

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Burhanuddin S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan cukai*. Yogyakarta; Medpress Digital
- Husaini Usman. 2014. *Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan edisi 4*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Ismail Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta; PT Gelora Aksara.
- Jeremi Alessandro. 2022. *Sanksi Administratif bagi wajib pajak dalam perspektif hukum perpajakan di Indonesia*. Lex Administratum.
- M. P. Hasibun 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Lawrence M.Friedman. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Max Weber. 2019. *BAB IV Teori pengawasan kekuasaan Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press.
- Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Ronny Hamitijo Soemitra. 1990. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- S. F. Marbun. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Cetakan 1. FH UH Press.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Glora Madani Press.
- Sondang P Siagian. 2003. *Teori dan Praktek kepemimpinan*. Jakarta; Rineka Cipta.

- _____. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta; Gunung Agung.
- _____. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada..
- Trisno Raharjo. 2005. *Narkoba Ancaman Masa Depan (panduan Pencegahan dan penaggulangannya)*. Yogyakarta; LPM UMY Press.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Adinistrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

JURNAL

- Ariani Arifin (dkk). 2019. Natural Resource Management For Sustainable Development In Managng Environmental Permit. IOP Conference series: Earth and Environment Science.
- Arini Nur Annisa (dkk). 2022. Government supervision of the rights Fulfillment of Housed workers in the Transition Period. Awang Long Law Review. Vol 5 No. 1.
- Bayu Puji Hariyanto. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No.1.
- Dewi Iriani. 2015. *Kejahatan Nakoba: Penanggulangan, pencegahan dan penerapan Hukuman Mati*. Justitia islamica. Volume 12 No.2.
- Nurwahda Rahman, Samsir Rahim, & Hafidz Elfiansyah, (2018). *Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai kantor PT PLN (Persero) wilayah Sulselbar*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No.3.
- Piter Pasaribu (dkk). 2022. Rencana Penggunaan Cukai untuk Minuman Bergula. Warta Bea Cukai. Volume 54 No.04.
- Ridwan Lasabuda. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax. Volume 1 No 2.
- Risno. 2022. *Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem pengawasan pengelolaan Renstra APBDDESA*. Islamic Economic and Business Journal, Volume 4 no. 1.

Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 no. 3.

Sakti, Fajar Tri., & Fauzia. 2018. *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8 no.1 .

Sri Nawatmi. et.al. 2022. *Sosialisasi Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Penamas, Volume 6 no. 1

Wina Kustia. 2013. Analisis Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Makassar Dalam Perspektif Transportasi Antarmoda. Jurnal Transportasi. Volume 25 no. 5.

Skripsi

Dewiyanti Ratnasari. 2014. *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar*. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Indah Alfiani. 2016. *Pecegahan Tindak Pidana Kepabeanaan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar*. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Mohamad Darajat. 2019. Kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Website

Admin Web bea dan Cukai. Tugas dan Fungsi. <https://bcmakassar.beacukai.go.id/tusi.html>. Diakses pada 2 Februari 2023 pukul 10.41.

Admin Web Bea dan Cukai. Peran Pengawasan Bea Cuai Makassar Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional. <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-peran-pengawasan-bea-cukai-makassar-dalam-mendukung-stabilitas-ekonomi-nasional.html>. Diakses pada 2 Februari 2023 pukul 14.19

<https://makassar.sindonews.com/read/680289/710/polres-pelabuhan-makassar-gagalkan-penyelundupan-sabu-21-kg-dari-surabaya->

1644310967 , diakses pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

<https://portalmedia.id/read/5835/kasus-narkoba-puluhan-kg-didominasi-jalur-laut-granat-makassar-bahan-evaluasi-otoritas-pelabuhan?page=2> , diakses pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Pukul 10.20 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Dibidang Cukai.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022-2024

Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 105/BC/2014 Tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.